

KONSTRUKSI REALITAS DALAM PEMBERITAAN PELANTIKAN PRESIDEN JOKO WIDODO Analisis Framing pada Laporan Utama Majalah TEMPO dan Majalah GATRA

Dessita Chairani dan Dessy Kania

Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie
 Jl. Rasuna Said Kav-22, Kuningan, Jakarta Selatan, 12920
 E-mail: dessita.chairani@gmail.com dan dessy.kania@bakrie.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sosok Jokowi yang berbeda dari biasanya dan mengundang rasa ingin tahu dari masyarakat. Peran dan posisi media menjadi penting dalam mengkonstruksi sosok Jokowi dalam sebuah konten yang berisi pemberitaan positif maupun negatif. Konten tersebut tentunya dengan sendirinya akan membentuk opini publik di masyarakat, bagaimana masyarakat memandang Jokowi. Karenanya, media memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan produk media yang objektif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis konstruksi realitas yang dibangun media dan faktor yang memengaruhi *framing* media terhadap isu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksi realitas sosial oleh Peter L. Berger dan Luckmann serta teori *Mediating the Message* oleh Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis dan metode analisis *framing* yang didapat melalui observasi non-partisipan, wawancara dengan membandingkan kedua majalah, *GATRA* dan *TEMPO*. Hasil penelitian adalah konstruksi realitas *TEMPO* terhadap Jokowi lebih positif dan *GATRA* cenderung netral yang dominan dipengaruhi oleh faktor ideologi. Faktor lain yaitu rutinitas media dan organisasi medianya. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat dibahas lebih mendalam terkait objektivitas media, baik dari media cetak, *online*, maupun elektronik.

Kata kunci: konstruksi realitas sosial, TEMPO, GATRA, pelantikan presiden Jokowi

Abstract

This research is based on the idea that Jokowi is the new figure in Indonesia that attracts curiosity of the public. This idea makes media role and position become important in constructing Jokowi's figure in media content, whether it's in positive or negative tone. Therefore, media has a responsibility to create an objective product. The purpose of this study is to look and analyze the construction of reality built by media and the factors that influence the framing that used by the media to construct reality in their product. The theory used in this study is Social Construction Theory by Peter L. Burger and Luckmann and Mediating the Message Theory by Pamela J. Anderson and Stephen D. Reese. Thus study uses descriptive qualitative analysis approach with framing analysis as its methodology, obtained through non-participant observation and depth-interviews by comparing two magazines, TEMPO and GATRA. The result of this study is that TEMPO uses a positive tones to construct reality towards Jokowi's figure and GATRA tend to uses a neutral tone and approach in describing the issue. This result is influenced dominantly by the ideology of the media. Another factors that also influenced the construction of reality are media routine and organizational level. It is expected that future studies can discussed more about media objectivity, not only on print media, but also online and electronic.

Keywords: social construction theory, TEMPO, GATRA, presiden inaguration of Jokowi

Pendahuluan

Sosok pemimpin adalah sosok yang selalu menjadi pusat perhatian dan sorotan. Terlebih lagi pemimpin sebuah negara. Media yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintahan dan fungsi menyebarkan informasi tentunya menjadi wadah bagi masyarakat dalam melihat, memantau, dan menilai sosok pemimpin negara mereka. Hal ini menjadi semakin penting sejak Indonesia melaksanakan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Peran media dalam menyediakan informasi terkait calon pemimpin atau pemimpin terpilih menjadi sangat penting.

Sejak pertama kali Indonesia melaksanakan pemilihan presiden secara langsung pada 2004 hingga pemilihan presiden 2009, tidak banyak muncul sosok calon pemimpin baru, pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pilpres tahun 2009 masih mendaur ulang pasangan calon dari pilpres 2004. Kemudian, pada pilpres 2014 muncul sosok baru yang menjadi sorotan masyarakat Indonesia, yang kemudian mencalonkan dirinya sebagai Presiden, yaitu Joko Widodo (Jokowi). Jokowi mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sejak Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kehadiran sosok Jokowi bagaikan sebuah fenomena baru di dunia politik Indonesia. Jokowi pun mulai menjadi topik favorit bagi media.

Jokowi hadir dengan gaya kepemimpinan yang berbeda dari pemimpin yang sering menjadi sorotan media selama ini. Jokowi menjadi antitesis dengan pemimpin pendahulunya yang mengagung-agungkan jabatan. Latar belakang dan karakteristiknya pun berbeda dari sosok presiden pendahulunya. Sosok Jokowi mengubah karakteristik sosok pemimpin di Indonesia yang biasanya memiliki kharisma, berasal dari kalangan militer atau universitas terbaik, dan berasal dari keluarga elit politik (Susetyo, 2014: 1).

Sosok Jokowi yang berbeda dari *stereotype* sosok pemimpin di Indonesia, membuat Jokowi menjadi sosok yang mengundang rasa ingin tahu dari masyarakat Indonesia. Hingga akhirnya, media massa,

sebagai sarana penyampaian komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massa (Tamburaka, 2012: 13), menjadi tujuan utama masyarakat dalam memuaskan rasa ingin tahunya terhadap Jokowi. Peran dan posisi media massa pun menjadi penting dalam merepresentasikan sosok Jokowi. Media dapat mengkonstruksi sosok Jokowi dalam sebuah konten yang berisi pemberitaan yang positif maupun negatif. Konten tersebut tentunya dengan sendirinya akan membentuk opini publik di masyarakat, bagaimana masyarakat memandang sosok Jokowi. Maka dari itu, media memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan produk media yang objektif.

Objektivitas merupakan gagasan yang relatif kompleks ketika salah satu melampaui gagasan sederhana bahwa berita haruslah laporan yang dapat diandalkan dan jujur mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dunia (McQuail, 2011:96). Pilpres tahun 2014 banyak menimbulkan titik rawan yang memiliki potensi menimbulkan konflik horizontal. Salah satu alasan yang dapat menyebabkan konflik tersebut adalah bias media atau media yang tidak objektif, yang merupakan hasil dari media yang menjadi corong capres-cawapres tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa tema yang diangkat dalam penelitian ini yaitu *framing* media massa dengan judul “Konstruksi Realitas Pemberitaan Pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 dalam Laporan Utama Majalah TEMPO dan Majalah GATRA”.

Tinjauan Pustaka

Konstruksi Realitas oleh Media Massa

Pesan-pesan yang disampaikan oleh media melalui produk medianya dibangun dan dibentuk untuk suatu tujuan tertentu. Terdapat motif di balik setiap pesan yang ditampilkan dalam produk medianya, baik berupa berita, *headline*, liputan khusus, dan sebagainya. Motif ini berupa nilai-nilai yang ingin ditanamkan media dalam benak pemirsa dan pembacanya. Tamburaka (2012: 85) mengemukakan bahwa pada dasarnya manusia memiliki pengharapan dan kemampuan menyerap pesan secara kognisi.

Perubahan kognitif dalam pikiran individu dapat memengaruhi pula perubahan sikap dan perilaku kita dalam memandang dan memahami dunia. Selain itu, media tidak hanya berperan sebagai sarana informasi yang menyampaikan berita secara aktual (baru) dan faktual (apa adanya) tetapi lebih dari itu, mereka mencoba membangun suatu nilai dalam pikiran dan benak kita sebagai pemirsa dan pembacanya.

Tahapan Konstruksi dalam Teori Konstruksi Sosial Media Massa

Bungin (2011) juga menjelaskan bahwa posisi “konstruksi sosial media massa” adalah mengoreksi substansi kelemahan dan melengkapi “konstruksi sosial atas realitas”, dengan menempatkan seluruh kelebihan media massa dan efek media pada keunggulan “konstruksi sosial media massa” atas “konstruksi sosial atas realitas”. Namun proses simultan yang digambarkan di atas tidak bekerja secara tiba-tiba, namun terbentuknya proses tersebut melalui beberapa tahap penting. Konten konstruksi sosial media massa, dan proses kelahiran konstruksi sosial media massa dapat dijelaskan melalui tahanan-tahap sebagai berikut.

1. Tahap Menyiapkan Materi Konstruksi

Menyiapkan materi konstruksi sosial media massa adalah tugas redaksi media massa, tugas itu didistribusikan pada *desk editor* yang ada di setiap media massa. Ada tiga hal penting dalam mempersiapkan materi konstruksi sosial, yaitu keberpihakan media massa kepada kapitalisme, keberpihakan semu kepada rakyat, dan keberpihakan kepada kepentingan umum. Dalam mempersiapkan materi konstruksi, media massa memposisikan diri pada tiga hal tersebut, namun pada umumnya keberpihakan kepada kepentingan kapitalis menjadi sangat dominan mengingat media massa adalah mesin produksi kapitalis yang mau ataupun tidak harus menghasilkan keuntungan.

2. Tahap Sebaran Konstruksi

Prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial media massa adalah semua informasi harus sampai pada pemirsa atau pembaca secepatnya dan setepatnya berdasarkan

agenda media. Apa yang dipandang penting oleh media, menjadi penting pula bagi pemirsa atau pembaca.

3. Tahap Pembentukan Konstruksi Realitas

Setelah pemberitaan telah sampai ke pemirsa atau pembacanya, terjadi pembentukan konstruksi di masyarakat melalui tiga tahap yang berlangsung secara generik. Pertama, konstruksi realitas membenaran, kedua, kesediaan dikonstruksi oleh media massa, dan ketiga sebagai pilihan konsumtif.

Selanjutnya dalam bagian ini terdapat tahap pembentukan konstruksi citra yang merupakan bangunan yang diinginkan oleh tahap konstruksi, di mana bangunan konstruksi citra yang dibangun oleh media massa ini terbentuk dari dua model, yaitu *good news* dan *bad news*. Model *good news* adalah sebuah konstruksi yang cenderung mengkonstruksi suatu pemberitaan sebagai pemberitaan yang baik. Sedangkan model *bad news* adalah sebuah konstruksi yang cenderung memberi citra buruk pada objek pemberitaan sehingga terkesan lebih jelek, lebih buruk, lebih jahat dari sesungguhnya kejelekan, keburukan, dan kejahatan yang ada pada objek pemberitaan itu sendiri.

4. Tahap Konfirmasi

Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa maupun pemirsa dan pembacanya memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi. Bagi media, tahapan ini perlu sebagai bagian untuk memberi argumentasi terhadap alasan-alasannya konstruksi sosial. Sedangkan bagi pemirsa dan pembaca, tahapan ini juga sebagai bagian untuk menjelaskan mengapa ia terlibat dan bersedia hadir dalam proses konstruksi sosial.

Teori *Mediating the Message*

Teori *Mediating the Message* oleh Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese ini membahas tentang isi media dan pengaruh yang membentuknya. Shoemaker dan Reese melihat penelitian media massa dari sudut pandang

berbeda dibandingkan dengan yang umum dilakukan. Penelitian media massa pada umumnya cenderung menggunakan isi atau konten media sebagai titik awal yang melihat efek konten media pada audiens, proses penerimaan konten oleh audiens dan lain sebagainya. Lain halnya dengan Shoemaker dan Reese yang justru melihat faktor-faktor internal dan eksternal dari organisasi media yang memengaruhi konten pemberitaan media.

Shoemaker dan Reese percaya bahwa konten media massa tidak mencerminkan dunia sebagaimana adanya, melainkan konten media dibentuk oleh banyak faktor yang menghasilkan realitas dengan berbagai versi. Faktor-faktor tersebut, di antaranya pengaruh dari individu pekerja media (*individual media workers level*), pengaruh dari rutinitas media (*media routines level*), pengaruh dari organisasi media (*organizational level*), pengaruh dari luar media (*outside media level*), dan pengaruh ideologi (*ideology level*).

Framing

Seperti halnya analisis isi dan analisis semiotik, *framing* adalah salah satu metode analisis media. Secara sederhana, *frame* di sini berarti bingkai yang digunakan media dalam mendeskripsikan sebuah peristiwa. Sobur (2001: 162, dalam Kriyanto, 2012: 255) mengatakan bahwa *framing* digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atas cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif inilah yang kemudian akan menentukan fakta mana yang akan diambil, ditonjolkan, dibuang, dan hendak dibawa ke mana pemberitaan tersebut.

Eriyanto (2012: 2) mengatakan bahwa media bukanlah saluran yang bebas, media tidak memberitakan sebuah peristiwa seperti ada adanya. Media tidak diibaratkan sebagai sebuah cermin realita, melainkan sebagai sebuah jendela, sejauh apa sebuah peristiwa itu tampak dari jendela tersebut, seperti itulah yang tertuang dalam produk medianya. Dari jendela tersebut, ada bagian yang terbuang dan ada bagian yang terlihat. Dalam *framing*, penyajian kebenaran tentang suatu peristiwa tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan

secara halus. Hal ini dilakukan dengan menonjolkan beberapa aspek tertentu, menggunakan perangkat wacana untuk memperkuat penonjolan tersebut (Eriyanto, 2012: 331).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis *framing* sebagai pendekatan metodologisnya. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Bagian yang lebih ditekankan dalam penelitian kualitatif adalah kedalaman (kualitas) data, bukan banyaknya (kuantitas) data (Kiyantono, Rachmat, 2012: 56). Sedangkan *framing* adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. *Framing* juga adalah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media (Eriyanto, 2012: 76). Metode ini dipilih karena mampu menemukan fakta dan gejala sosial yang diamati seperti motif dan tindakan individu atau kelompok dalam realitas sosial yang terjadi.

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengambil lokasi di majalah mingguan *TEMPO* edisi 13-19 Oktober dan 27 Oktober- 2 November 2014 dan *GATRA* edisi 16-22 Oktober dan 23-29 Oktober 2014. Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan gambaran *framing* konstruksi realitas yang dilakukan Majalah *TEMPO* dan *GATRA* tentang Pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden RI ke-7.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *framing* Robert N. Entmant. Entmant (1993) dalam Eriyanto (2012) menjelaskan bahwa *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak di bawa kemana berita tersebut.

Artikel laporan utama tentang Joko Widodo sebagai presiden terpilih hasil pilpres 2014 oleh dua majalah mingguan nasional ini akan dianalisa menggunakan perangkat *framing*

yang dibagi menjadi empat struktur, yaitu pendefinisian masalah (*define problems*), memperkirakan masalah atau sumber masalah

(*diagnose causes*), membuat keputusan moral (*make moral judgement*), dan menekankan penyelesaian (*treatment recommendation*).

Hasil dan Pembahasan

Majalah TEMPO

1. Artikel 1

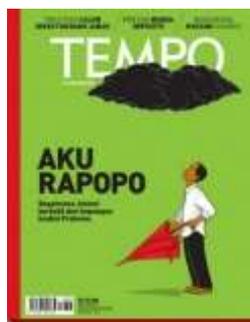
Judul : Berjaga Menjelang Hari-H

Sumber : Majalah TEMPO, edisi 13-19 Oktober 2014

Analisis Framing:

<i>Define Problems</i>	Penjagalan dan penghambatan pelantikan Jokowi sebagai presiden
<i>Diagnoses Causes</i>	Penguasaan “paket” kepemimpinan Parlemen, isu menghambat
<i>Make Moral Judgement</i>	Para pendukung Prabowo-Hatta di parlemen yang tidak seharusnya dilakukan dan dapat mempermalukan lembaganya sendiri
<i>Treatment Recommendation</i>	Relawan turun ke jalan dan para petinggi koalisi pendukung Jokowi menyusun strategi

Define Problems. Artikel ini menjelaskan bagaimana koalisi Prabowo-Hatta yang telah kalah dalam pilpres 2014 ingin menjegal Jokowi-JK untuk menjadi presiden dan wakil presiden periode selanjutnya. Hal ini dapat dilihat dari halaman muka dari majalah mingguan TEMPO edisi 13-19 Oktober 2014, lengkap dengan judul laporan utamanya. Halaman muka atau *cover* majalah tersebut mengilustrasikan Jokowi berdiri menengadahkan ke arah awan hitam yang menaungi dirinya, sembari memegang sebuah payung berwarna merah, dan di samping ilustrasi tersebut terdapat judul: “Aku Rapopo: Bagaimana Jokowi Berkelit dari Kepungan Koalisi Prabowo.”



Gambar 1. Cover Majalah TEMPO edisi 13-19 Oktober 2014
(Sumber: majalah.tempo.co)

Penjelasan isu dalam artikel ini juga didukung oleh ilustrasi di awal artikel yang menggambarkan sosok Prabowo yang menunggangi kuda sembari memegang tali yang sedang mengejar Jokowi yang mengendarai banteng. Sebagai berikut:



Gambar 2. Ilustrasi Artikel Laporan Utama, oleh Kendra Paramita
(Sumber: Majalah TEMPO edisi 13-19 Oktober 2014)

Dalam ilustrasi artikel laporan utama artikel di atas, Prabowo digambarkan memegang tali layaknya seorang matador dalam posisi menyerang dan siap menangkap banteng yang ditunggangi oleh Jokowi. Ilustrasi ini menggambarkan isu yang dibahas dalam artikel, yaitu isu

Prabowo yang berusaha menjegal Jokowi dalam pelantikan presiden.

Diagnoses Causes. Penyebab masalah yang dibingkai oleh TEMPO pada artikel ini adalah koalisi Prabowo yang telah berhasil menguasai kepemimpinan parlemen, yaitu ketua MPR dan DPR yang berasal dari koalisi partai pendukung Prabowo-Hatta, seperti yang disebutkan dalam kutipan artikel berikut ini:

Isu adanya penjegalan menguat setelah koalisi partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di parlemen berhasil menguasai jabatan pemimpin DPR dan kemudian MPR, Rabu Pekan lalu. [...] Dikuasainya "paket" pemimpin MPR ini menghembuskan kabar bahwa kubu Prabowo akan mengganggu jalannya pelantikan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019, Senin pekan depan. Kepada Tempo, Sekretaris Fraksi PKB di MPR, Abdul Kadir Karding, mengatakan sudah mendengar akan adanya aksi menghambat atau menjegal pelantikan presiden. Cara yang dilakukan adalah memanfaatkan strategi kuorum dalam sidang paripurna MPR untuk pengambilan sumpah presiden (Majalah TEMPO edisi 13-19 Oktober 2014, Hal. 36).

Make Moral Judgment. Penilaian moral dalam artikel ini dijatuhkan kepada pendukung Prabowo-Hatta di parlemen yang dianggap akan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan. Rencana atau upaya penjegalan yang menjadi masalah dalam artikel ini dipandang sebagai sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang anggota

parlemen. Hal ini dijelaskan langsung pada kutipan artikel berikut ini:

[...] pelantikan Jokowi tetap bisa digelar meski hanya dihadiri satu pemimpin MPR dan pemimpin Mahkamah Agung. "Tapi, jika penjegalan terjadi, itu namanya aksi memermalukan lembaga sendiri," ujarnya (Majalah TEMPO edisi 13-19 Oktober 2014, Hal. 37).

Treatment Recommendation. Saran penyelesaian masalah yang dibingkai oleh TEMPO pada artikel ini ada dua, yaitu pertama para relawan pendukung Jokowi-JK yang akan mengawal langsung pelantikan presiden, hal ini disebutkan dalam kutipan artikel berikut ini:

[...] ratusan wakil dari puluhan organisasi relawan Jokowi bersepakat turun ke jalan mengawal pelantikan Jokowi. "Jangan salahkan masyarakat bertindak sendiri kalau politikus di MPR itu menghalangi hasil pilihan rakyatnya," (Majalah TEMPO edisi 13-19 Oktober, Hal. 38).

Kedua, pencegahan yang dilakukan oleh para petinggi partai koalisi pendukung Jokowi-JK yang telah menyusun strategi menghadapi penjegalan atau hambatan pada saat pelantikan. Berikut ini kutipan artikel yang menjelaskan penyelesaian masalah:

Peta politik terakhir di Senayan itu, misalnya, sudah dibahas di rumah Megawati pada Ahad pekan lalu. Para petinggi koalisinya sepakat bergerak mengecek situasi. "Kami membuat plan A sampai Z, " (Majalah TEMPO edisi 13-19 Oktober 2014, Hal. 39).

2. Artikel 2

Judul : Bukan 'All Jokowi's Men'

Sumber : Majalah TEMPO, edisi 27 Oktober – 2 November 2014

Analisis Framing:

<i>Define Problems</i>	Alasan pengumuman susunan kabinet yang terlambat
<i>Diagnoses Causes</i>	Beberapa nama dalam rancangan susunan dicurigai terjerat kasus korupsi dan rasa tidak nyaman terhadap calon yang diajukan oleh orang-orang sekitar Presiden Jokowi
<i>Make Moral Judgement</i>	Jokowi harus lebih berkompromi
<i>Treatment Recommendation</i>	Diskusi dan pengajuan nama calon baru untuk disaring/diperiksa KPK dan PPATK

Define Problems. Artikel ini menjelaskan mengapa susunan kabinet Presiden Jokowi dan Wapres Kalla terlambat diumumkan. Hal ini dapat dilihat dari alasan-alasan yang dijelaskan dalam artikel ini, juga disebutkan dalam artikel ini bahwa pengumuman kabinet sempat batal beberapa kali.

Jokowi dan Kalla datang ke rumah Mega beberapa saat setelah "pembatalan" pengumuman Kabinet di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Majalah TEMPO edisi 27 Oktober – 2 November 2014, Hal. 36).

[...] presiden tiba-tiba mengungkapkan rencana pengumuman kabinet. "Jamnya nanti diberitahukan. Kalau tidak di Pluit, di Tanah Abang, mungkin di Tanjung Priok," ujar Jokowi (Majalah TEMPO edisi 27 Oktober – 2 November 2014, Hal. 37-38).

Ternyata acara batal. Menurut orang dekat Kalla, sekitar pukul 19.00, presiden menghubungi Kalla untuk mengajak ke Tanjung Priok. Ajakan ditolak dengan alasan anggota kabinet belum genap (Majalah TEMPO edisi 27 Oktober – 2 November 2014, Hal. 38).

Penyebab kedua adalah masing-masing Jokowi, Kalla, dan Mega yang kurang nyaman dengan calon yang masing-masing ajukan. Mega dan Kalla tidak sreg dengan

calon yang diajukan Jokowi, Jokowi bersikeras memasukkan satu nama, dan Kalla dan Mega yang memperebutkan posisi menteri BUMN. Tarik ulur nama ini membuat susunan kabinet terus berubah-ubah dan menjadi penyebab terulurnya pengumuman kabinet. Hal ini dijelaskan dalam paruh akhir artikel sebagai berikut:

Menurut sejumlah elite di kalangan PDIP dan Kalla, Mega tak sreg dengan mantan Menteri Perindustrian Luhut Binsar Panjaitan, yang dianggap terlalu memengaruhi Jokowi. (Majalah TEMPO edisi 27 Oktober – 2 November 2014, Hal. 38).

Luhur disebut-sebut selalu menyodorkan dua calon untuk setiap posisi di kabinet. "Kalau bisa, semua diambil sama dia," ujar politikus PDIP. Faktor Luhut menyatukan Mega dan Kalla. Keduanya menganggap pensiunan jenderal bintang tiga itu terlalu mendominasi atas Jokowi. (Majalah TEMPO edisi 27 Oktober – 2 November 2014, Hal. 38).

Jokowi awalnya berkeras memplot Luhut untuk posisi Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan (Majalah TEMPO edisi 27 Oktober – 2 November 2014, Hal. 39).

Peta berubah begitu menyangkut Rini Soemarno. Kalla berseberangan sikap dengan Mega. Label kuning dari KPK membuat Kalla punya alasan kuat mendepak Rini, yang juga dinilai banyak memengaruhi Jokowi (Majalah TEMPO edisi 27 Oktober – 2 November 2014, Hal. 39).

Mega juga “bertempur” dengan Kalla dalam perebutan Menteri BUMN. Karena Rini terjegal label, Kalla segera menyodorkan Sofyan Djalil untuk mengisi pos itu (Majalah TEMPO edisi 27 Oktober – 2 November 2014, Hal. 39).

Make Moral Judgment. Penilaian moral dalam artikel ini dijatuhkan pada presiden Jokowi yang dianggap harus lebih berkompromi dalam membentuk kabinetnya. Jokowi harus mendiskusikan langkah-langkah yang akan diambil dalam memutuskan calon anggota kabinetnya. Hal ini dijelaskan dalam *caption* dari tabel gambaran rancangan susunan kabinet, yang berbunyi:

Presiden Joko Widodo harus menerima kompromi untuk menentukan kabinetnya. Empat penjurur menyodorkan calon: Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, dan Luhut Panjaitan (Majalah TEMPO edisi 27 Oktober – 2 November 2014, Hal. 38).

Selain berkompromi, Jokowi juga diharapkan untuk mendiskusikan langkah-langkah yang akan diambil dalam memutuskan calon anggota kabinetnya. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mempertanyakan sebuah langkah yang diambil Jokowi dan JK, yang dijelaskan dalam kutipan artikel berikut ini:

Mega bahkan mempertanyakan langkah Jokowi dan Kalla yang meminta komisi antikorupsi dan

pusat analisis transaksi menelusuri jejak para calon tanpa sepengetahuan dia (Majalah TEMPO edisi 27 Oktober – 2 November 2014, Hal. 36).

Treatment Recommendation. Penyelesaian masalah yang dijelaskan dalam artikel ini ada dua, pertama adalah melalui diskusi. Diskusi ini dilakukan antara beberapa orang di antaranya Mega, Jokowi, Kalla, Rini Soemarno, Andi Widjajanto, dan Hasto Kristiyanto di kediaman Mega. Diskusi ini membahas pencoretan nama Rini dan Budi dari susunan kabinet yang menjadi awal masalah yang dijelaskan dalam artikel. Hal ini dijelaskan dalam kutipan artikel berikut ini:

Sekitar pukul 20.30, Mega mengundang Jokowi dan Kalla ke Teuku Umar. Ketika keduanya tiba, sudah ada beberapa orang termasuk Rini, Andi, dan Hasto. Terjadilah pertemuan tertutup Mega dengan Presiden dan Wakil Presiden yang seru mempersoalkan bakal terecoretnya nama Rini dan Budi (Majalah TEMPO edisi 27 Oktober – 2 November 2014, Hal. 38).

Penyelesaian kedua adalah membuat daftar nama calon baru untuk susunan kabinetnya, yang kemudian Jokowi serahkan ke KPK dan PPATK untuk diperiksa. Hal ini disampaikan dalam paragraf akhir artikel, sebagai berikut:

Karena sejumlah nama tidak lolos dalam saringan komisi antikorupsi dan pusat pelaporan transaksi, Jokowi-Kalla mengajukan calon baru ke dua lembaga itu (Majalah TEMPO edisi 27 Oktober – 2 November 2014, Hal. 39).

Berdasarkan hasil wawancara dengan redaktur TEMPO, Jobpie Sugiharto, artikel ini ingin menceritakan proses presiden dalam menyeleksi anggota kabinetnya.

Alasan memilih *angle* proses seleksi anggota kabinet ini di antaranya adalah karena memang saat itu presiden sedang melakukan penyeleksian dan menurut *TEMPO* hal itu menarik untuk di sorot, tidak hanya hasil, melainkan juga sebuah proses. Lebih lanjut Sugiharto menjelaskan bahwa

terdapat sebuah daya tarik tersendiri dalam proses seleksi anggota kabinet ini karena terdapat sebuah negosiasi yang kompleks dengan banyaknya unsur yang terlibat. Kemudian mengakibatkan sebuah tarik menarik antarunsur tersebut.

Majalah GATRA

1. Artikel 1

Judul : Galau Pelantikan Presiden Gagal

Sumber : Majalah GATRA, edisi 16-22 Oktober 2014

Analisis *Framing*:

<i>Define Problems</i>	Kekhawatiran KIH terhadap isu kegagalan pelantikan presiden
<i>Diagnoses Causes</i>	KMP menguasai kursi pimpinan parlemen (DPR dan MPR)
<i>Make Moral Judgement</i>	UU pasal 74 MD3 ayat (1), (2), dan (6)
<i>Treatment Recommendation</i>	Menggemukkan kabinet

Define Problems. Pada artikel ini permasalahan mengenai isi berita menyangkut tentang isu kegagalan pelantikan presiden oleh Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendukung pasangan capres Prabowo-Hatta yang kalah dalam pilpres 2014. Isu ini membuat kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung pasangan capres Jokowi-JK pemenang pilpres 2014, khawatir. Kekhawatiran ini dapat dilihat dari kutipan artikel berikut ini:

[...] merisaukan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yang mengantarkan Jokowi-Jusuf Kalla memenangi pemilihan presiden. Menjelang pelantikan, santer beredar kabar bahwa pelantikan Jokowi bakal diganggu (Majalah GATRA edisi 16-22 Oktober 2014, Hal. 18).

Namun isu ini dibantah oleh beberapa pihak. Yang pertama oleh pengamat politik Fajroel Rachman yang menyatakan kegagalan tersebut mustahil. Kedua, oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menegaskan bahwa ia yakin anggota fraksi akan hadir. Hal ini dapat dilihat dari kutipan artikel berikut ini:

Jaminan pelantikan Jokowi tetap berjalan sesuai rencana disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan. Politikus Partai Amanat Nasional tersebut menyatakan bahwa kesuksesan acara pelantikan itu akan menjawab isu-isu yang beredar, yang menurutnya kurang bertanggung jawab. Seperti, akan adanya penjejalan, kegagalan, dan pemakzulan. "Seram-seram beritanya tuh. Pelantikan presiden itu wajah Indonesia. Tidak ada pilihan kecuali harus sukses," katanya kepada Hidayat Adiningrat dari GATRA. "Saya yakin untuk kepentingan kebangsaan, bukan kepentingan partisan, teman-teman fraksi itu semua akan datang. Jadi tidak usah khawatir," katanya (Majalah GATRA edisi 16-22 Oktober 2014, Hal. 19).

Diagnoses Causes. Dalam artikel ini, yang diposisikan sebagai penyebab masalah adalah Kubu Koalisi Merah Putih (KMP). KMP yang memenangkan seluruh kursi pimpinan di parlemen ini, membuat

khawatir kubu KIH akan adanya usaha mengacaukan jalan presiden terpilih Jokowi ke depannya. Kekhawatiran pertama tertuju pada penjegalan pelantikan. Hal ini tergambar pada kalimat pertama *lead* artikel berikut ini:

“Kalah beruntun dalam perebutan kursi pimpinan parlemen, KIH khawatir pelantikan presiden terpilih dimainkan” (Majalah GATRA edisi 16-22 Oktober 2014, Hal. 18).

Kekhawatiran lain datang dari sekretaris fraksi partai pendukung Jokowi, Bambang Wuryanto, yang mencurigai akan adanya kemungkinan, meskipun masih jauh, untuk dilancarkannya usaha *impeachment* presiden atau melengserkan presiden. Hal ini terlihat dari kutipan artikel berikut ini:

“Saya memang tidak mau langsung bilang ujungnya usaha impeachment presiden, terlalu jauh. Tapi bisa dicurigai ke sana,” tegasnya (Majalah GATRA edisi 16-22 Oktober 2014, Hal. 20).

Make moral Judgment. Penilaian atas KMP sebagai sumber masalah ini dilandasi

oleh UU pasal 74 MD3, terutama ayat (1), (2), dan (6). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa DPR memiliki kekuatan untuk melawan pemerintah yang otomatis membuat KMP terlihat memiliki kekuatan lebih dari KIH. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa DPR berhak memberi rekomendasi kepada pejabat pemerintah dan negara. Rekomendasi DPR itu juga wajib dilaksanakan. Jika tidak, DPR bisa menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, dan hak bertanya. Pada ayat (6), dalam hal badan hukum atau warga negara mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi, DPR dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk dikenai sanksi (Majalah GATRA edisi 16-22 Oktober 2014, Hal. 20).

Treatment Recommendation. Penyelesaian masalah yang tertulis dalam artikel ini adalah dengan menambah jumlah menteri yang akan membantu dan mendukungnya dalam menjalankan amanah memimpin negara. Tindakan ini dilakukan Jokowi untuk merangkul kekuatan yang lebih besar agar dapat memberikan perlawanan. Padahal awalnya Jokowi berniat untuk merampingkan kabinet.

2. Artikel 2

Judul : Seleksi Menteri Tanpa Jejak Korupsi
 Sumber : Majalah GATRA, edisi 23-29 Oktober 2014
 Analisis Framing:

<i>Define Problems</i>	Tarik-m menarik dalam penyusunan kabinet Jokowi
<i>Diagnoses Causes</i>	Hasil penelusuran KPK dan PPATK terhadap 43 nama calon menteri
<i>Make Moral Judgment</i>	Strategi Jitu Jokowi menggandeng KPK dan PPATK
<i>Treatment Recommendation</i>	Jokowi yang menampilkan ketegasan, independensi, dan keberanian menghadapi tekanan politik

Define Problems. Artikel ini menjelaskan bagaimana masalah Jokowi dalam penyusunan kabinetnya. Penyusunan kabinet ini menjadi sulit akibat adanya tarik menarik antara pihak-pihak yang menentukan susunan kabinet. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa penentu kabinet ini terdiri dari tiga tokoh, yaitu Jokowi, JK, dan

Megawati. Semuanya memiliki perannya masing-masing. Tarik-menarik ini diungkapkan oleh Analisis Politik Hanta Yuda, dalam kutipan artikel berikut ini:

Analisis politik Hanta Yuda menduga molornya pengumuman kabinet ini akibat tarik-menarik antar-pihak penenti. Hal itu, kata

Hanta dikarenakan beberapa hal (Majalah GATRA edisi 23-29 Oktober 2014, Hal. 30-31).

Diagnoses Causes. Penyebab masalah yang dibingkai oleh GATRA pada artikel ini adalah hasil penelusuran yang dilakukan oleh KPK dan PPATK atas permintaan presiden Jokowi. Hal ini menyebabkan beberapa calon yang telah diusung oleh partai pendukung terjegal dari daftar calon menteri. Dalam hasil penelusuran yang dilakukan oleh KPK dan PPATK, calon yang diduga terjerat kasus korupsi diberi label merah dan kuning, yang menandakan akan segera diproses secara hukum. Ketua KPK menyarankan pada presiden Jokowi, bahwa calon yang berlabel merah dan kuning tidak boleh dijadikan menteri. Hal ini yang kemudian menyebabkan perbedaan pendapat dan tarik-menarik antara pihak penentu, yaitu Jokowi, JK, dan Mega. Hal ini terlihat dalam kutipan artikel berikut ini:

Komplikasi baru pasca-penilaian KPK tidak hanya menimpa PKB. Megawati dikabarkan juga kecewa karena beberapa jagoanya, seperti Rini Soemarno, Teras Narang, dan Budi Gunawan berpotensi terganjal. JK juga sempat memperlihatkan sikap berbeda. Menurut JK, calon bertanda kuning masih bisa ditoleransi, demi asas praduga tak bersalah. Tapi Jokowi mematuhi saran KPK, bahwa merah dan kuning sama-sama tak layak dipilih (Majalah GATRA edisi 23-29 Oktober 2014, Hal. 30).

Make Moral Judgement. Penilaian moral dalam artikel ini dijatuhkan pada Jokowi dan JK atas strateginya menggandeng KPK dan PPATK dalam penyusunan kabinet. Jokowi-JK dinilai telah merintis cara baru dan jitu dalam menyeleksi calon menteri dengan melakukan penyaringan objektif melalui KPK dan PPATK. Hal ini digambarkan dalam *lead* artikel:

Jokowi merintis model baru seleksi integritas menteri dengan menggandeng KPK dan PPATK. Strategi jitu menahan tekanan politik partai pendukung. Kode merah-kuning KPK menjadi amunisi untuk mencoret calon menteri, sekalipun petinggi partai. Pelibatan KPK perlu dimapankan sebagai model rekrutmen pejabat publik yang lain (Majalah GATRA edisi 23-29 Oktober 2014, Hal. 26).

Hal ini juga diungkapkan oleh analis politik, Djayadi Hanan yang mengatakan bahwa strategi Jokowi menggandeng KPK ini adalah cara yang baik untuk membentengi Jokowi dari tekanan politik:

“Pelibatan KPK juga menjadi cara membentengi tekanan politik,” sambungnya. “Ke depannya, Jokowi akan lebih bisa menghadapi tekanan politik ini (Majalah GATRA edisi 23-29 Oktober 2014, Hal. 301).”

Treatment Recommendation. Saran penyelesaian masalah yang dibingkai oleh GATRA pada artikel ini adalah hendaknya Jokowi berani menghadapi tekanan yang akan menghadangnya, tegas, serta menunjukkan sikap independensi. Hal ini masih disampaikan oleh Djayadi, yang mengatakan bahwa Jokowi tidak perlu takut pada tekanan politik. Hal ini dijelaskan dalam paragraf terakhir artikel sebagai berikut:

Bila Jokowi menunjukkan independensi dan berani menghadapi tekanan politik Megawati, menurut Djayadi, hal itu sejalan dengan keinginan masyarakat. Saat ini, Jokowi pemimpin tertinggi dan tidak perlu takut terhadap tekanan politik. Jika menolak tekanan politik koalisi pro-Jokowi, ia akan menuai friksi internal KIH. Tapi, kata Djayadi, tidak lama. “kalau

partai koalisi mengancam akan keluar KIH, mau ngapain? Masuk KMP? KMP dapat apa?” kata Djayadi. “Risiko politiknya tidak berbahaya bagi Jokowi. Dia harus bisa lebih tegas. Lanjut saja,” tutupnya (Majalah GATRA edisi 23-29 Oktober 2014, Hal. 31).

Penulis artikel ini, Asrori S. Karni, menjelaskan bahwa *angle* dalam artikel ini adalah cara inovatif Jokowi dalam menyusun kabinet dengan menggandeng KPK dan PPATK. Dengan melibatkan KPK dan PPATK ini, Jokowi tidak hanya melihat kompetensi dari calon menternya, tapi juga integritas yang dibutuhkan untuk

membangun kabinet bebas korupsi. Pengikutsertaan KPK ini juga dipandang dapat dijadikan cara untuk menahan tekanan politik yang mungkin akan dihadapi Jokowi. Cara ini dilihat GATRA sebagai sebuah cara inovatif dan efektif dalam seleksi menteri.

Seperti artikel sebelumnya, dalam menjaga keberimbangan isi berita melakukan *cover both side*. Hal ini dipandang Karni selaku penulis artikel sebagai sesuatu yang lumrah dalam cara kerja jurnalistik. Hal ini merujuk pada etika jurnalistik, kode etik jurnalistik, dan visi-misi majalah GATRA.

Perbandingan Hasil Framing

	TEMPO	GATRA
Edisi Sebelum Pelantikan		
Judul Artikel	Berjaga Menjelang Hari-H	Galau Pelantikan Presiden Gagal
<i>Define Problems</i>	Penjagalan dan penghambatan pelantikan Jokowi sebagai presiden	Kekhawatiran KIH terhadap isu penggagalan pelantikan presiden
<i>Diagnoses Causes</i>	Penguasaan "paket" kepemimpinan Parlemen, isu menghambat pelantikan	KMP menguasai kursi pimpinan parlemen (DPR dan MPR)
<i>Make Moral Judgement</i>	Para pendukung Prabowo-Hatta di parlemen yang tidak seharusnya dilakukan dan dapat mempermalukan lembaganya sendiri	UU pasal 74 MD3 ayat (1), (2), dan (6)
<i>Treatment Recommendation</i>	Relawan turun ke jalan dan para petinggi koalisi pendukung Jokowi menyusun strategi	Menggemukkan kabinet
Edisi Setelah Pelantikan		
Judul Artikel	Bukan 'All Jokowi's Men'	Seleksi Menteri Tanpa Jejak Korupsi
<i>Define Problems</i>	Alasan pengumuman susunan kabinet yang terlambat	Tarik-manarik dalam penyusunan kabinet Jokowi
<i>Diagnoses Causes</i>	Beberapa nama dalam rancangan susunan dicurigai terjerat kasus korupsi dan rasa tidak nyaman terhadap calon yang diajukan oleh orang-orang sekitar Presiden Jokowi	Hasil penelusuran KPK dan PPATK terhadap 43 nama calon menteri
<i>Make Moral Judgement</i>	Jokowi harus lebih berkompromi	Strategi Jitu Jokowi menggandeng KPK dan PPATK

<i>Treatment Recommendation</i>	Diskusi dan pengajuan nama calon baru untuk disaring/diperiksa KPK dan PPATK	Jokowi yang menampilkan ketegasan, independensi, dan keberanian menghadapi tekanan politik
---------------------------------	--	--

Dalam *TEMPO* edisi 13-19 Oktober 2014 dan dalam *GATRA* edisi 16-22 Oktober 2014 (edisi seminggu sebelum pelantikan presiden), terdapat perbedaan dalam struktur pendefinisian masalah, struktur penilaian moral, dan struktur penyelesaian masalah. Isu besar yang diangkat sama, yaitu isu penjegalan atau penghambatan pelantikan presiden yang dilaksanakan pada 20 Oktober 2014.

Dari pendefinisian masalah, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian masalah yang dilakukan *TEMPO* terhadap isu penjegalan ini, nampak bahwa *TEMPO* menggunakan model *bad news* dalam mengkonstruksi pemberitaan sehingga akhirnya memberikan citra buruk pada objek pemberitaan, yang dalam artikel ini adalah para pendukung di Parlemen. Sedangkan *GATRA* menggunakan model *good news* yang lebih positif karena memandang isu hanya sebagai sebuah kekhawatiran yang kecil kemungkinannya untuk terjadi.

Dalam hal keberimbangan berita, *TEMPO* menghadirkan sanggahan terhadap isu tersebut melalui kutipan wawancara beberapa tokoh, antara lain Wakil Ketua MPR Evert Ernest, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik, para petinggi partai Koalisi Indonesia Hebat, orang dekat Jokowi, dan relawan Jokowi. Penulis tidak menemukan adanya pernyataan laagsung atau kutipan wawancara yang datang dari tokoh yang berasal dari partai Koalisi Merah Putih.

Berbeda dalam majalah *GATRA*. *GATRA* lebih terkesan berhati-hati dalam menyusun artikelnya. Hal ini tampak dari bagaimana penulis artikelnya menyusun sanggahan dan isu secara berdampingan. Setelah isu atau permasalahan dijelaskan, kemudian diikuti oleh sanggahan atau *counter argument* terhadap isu atau permasalahan tersebut. Penyanggahan juga datang tidak hanya dari pihak-pihak yang terlibat langsung, dalam kasus ini adalah Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih, namun juga datang dari pihak ketiga yaitu pakar atau pengamat.

Kemudian dalam *TEMPO* edisi 27 Oktober-2 November 2014 dan *GATRA* edisi 23-29 Oktober 2014 (edisi minggu setelah pelantikan), perbedaan terlihat jelas dalam tiap struktur *framing*, yaitu pendefinisian masalah, penyebab masalah, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian. Dalam majalah *TEMPO*, masalah yang dibingkai adalah alasan pengumuman susunan kabinet yang terlambat. Hal ini disebabkan beberapa nama yang diajukan dalam rancangan susunan tersebut dicurigai terjerat kasus korupsi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan KPK dan PPATK atas permintaan presiden Jokowi dan wakil presiden Jusuf Kalla. Penyebab lain adalah adanya rasa tidak nyaman terhadap calon yang diajukan oleh orang-orang dekat presiden. *TEMPO* menjatuhkan penilaian moral kepada presiden Jokowi.

Di sisi lain *GATRA* membingkai masalah sebagai tarik-menarik yang terjadi dalam proses penyusunan kabinet Jokowi. Dijelaskan dalam artikel bahwa tokoh kunci yang terlibat dalam penyusunan adalah Jokowi, JK, dan Megawati. Ketiga tokoh tersebut memiliki perannya masing-masing, dan telah terjadi tarik-menarik dalam menyusun kabinet di antara ketiganya, ditambah dengan ketua partai dalam KIH. Penyebab masalah yang digambarkan dalam artikel ini adalah hasil penelusuran KPK dan PPATK terhadap 43 nama calon menteri. Penelusuran ini dilakukan atas permintaan Jokowi-JK sebagai salah satu upaya menciptakan kabinet yang bersih. Penilaian moral dalam artikel ini dijatuhkan pada penelusuran oleh KPK dan PPATK yang dipandang sebagai sebuah strategi jitu dalam menyusun kabinet dan menghadapi tekanan politik yang akan dihadapi oleh Jokowi-JK. Penyelesaian masalah yang direkomendasikan dalam artikel ini adalah Jokowi yang diharapkan menampilkan sikap tegas, independen, dan berani dalam menghadapi tekanan politik.

Penulis melihat *framing* yang digunakan dalam dua artikel ini lagi-lagi berbeda. *TEMPO* lebih terkesan mengkritik atau negatif terhadap

tarik ulur yang terjadi dibandingkan dengan *GATRA*. *TEMPO* lebih menggambarkan proses tarik ulur, siapa tokoh yang terlibat, dan pengumuman susunan kabinet yang tidak pasti waktu dan lokasinya. Sedangkan *GATRA* lebih melihat proses penyeleksiannya, di mana campur tangan KPK dan PPAK dianggap strategi penting dan jitu dalam menyusun kabinet yang bersih.

Pembahasan

Dari perbandingan hasil *framing* dalam pembahasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa *TEMPO* ingin membangun konstruksi yang negatif kepada Prabowo dengan menyusun artikel dengan model *bad news*. Hal ini didukung oleh teori *framing* oleh Entman yang mengatakan bahwa *framing* adalah menonjolkan aspek tertentu dari sebuah isu, menempatkan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan perhatian lebih dibanding isu yang lain. Hal ini terjadi dalam artikel *TEMPO* "Berjaga Menjelang Hari-H" yang terbit seminggu sebelum pelantikan.

Dalam artikel tersebut, isu yang diangkat adalah isu penjegalan pelantikan Jokowi. Isu penjegalan ini dikaitkan dengan pernyataan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra dalam wawancara dengan *Wall Street Journal Online*. Dalam wawancaranya itu, Hashim menyebutkan bahwa KMP akan bersikap proaktif dan konstruktif terhadap pemerintahan Jokowi.

Fakta ini hadir dalam cara yang berbeda dalam artikel yang disusun *TEMPO* dan *GATRA*. Berbeda di dalam kedalaman fakta yang dihadirkan di dalam artikel. *TEMPO* menghadirkan fakta dalam kalimat sebagai berikut:

Isu penjegalan ini juga dikaitkan dengan pernyataan keras adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, perihal posisi partai koalisi pro-Prabowo di DPR. Dalam wawancaranya yang dimuat di surat kabar Wall Street Journal pekan lalu, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu menyebutkan, dengan kekuatan

koalisi politikus di parlemen itu, koalisi tersebut bisa menjadi oposisi aktif dan konstruktif dalam mengawal Jokowi. Namun, perihal pernyataannya bahwa seolah-olah koalisi itu akan terus menghajar Jokowi, belakangan Hashim meralatnya (TEMPO, edisi 13-19 Oktober 2014, hal. 37).

Sedangkan dalam artikel *GATRA*, kalimat yang disusun adalah sebagai berikut:

Tentang munculnya wawancara Hashim Djojohadikusumo dengan The Wall Street Journal Online yang menyatakan akan menjegal pemerintahan Jokowi, menurut Zulkifli, bukan masalah. "Pak Hashim sudah SMS kepada saya. 'Pak Zul, tidak betul saya omong begitu.' [...] Hasyim Djojohadikusumo, lewat pernyataan resmi yang dikirim melalui Gerindra Media Center, membantah pemberitaan yang seolah-olah dirinya akan menjegal pemerintahan Jokowi. Dia menyebutkan itu tidak benar dan menyesatkan opini publik pada dia dan KMP. "Tulisan yang menyimpulkan bahwa saya atau KMP akan bertindak menghambat pemerintahan Jokowi adalah tidak benar dan merupakan manipulasi besar yang tidak bertanggung jawab," katanya.

Hasyim menegaskan, KMP akan bersikap konstruktif dan proaktif pada pemerintahan Jokowi-JK. Artinya, akan mendukung segala kebijakan yang memberi dampak baik bagi masyarakat Indonesia. Namun, akan proaktif dengan mengawasi, mengkritik, dan mengoreksi kebijakan yang berpotensi merugikan rakyat (GATRA, edisi 16-22 Oktober 2014, hal. 19).

Dari kedua kutipan artikel di atas, yang membahas isu dan memberikan fakta yang sama, terdapat perbedaan yang signifikan pada penempatan informasi dan fakta yang ada. *GATRA* memilih menghadirkan informasi dan

fakta yang ada dengan lebih mendalam, dilengkapi dengan pernyataan dalam bentuk kalimat langsung dari pihak yang terlibat.

Sedangkan *TEMPO* memilih menghadirkan fakta yang ringkas dan padat, namun tidak mengedepankan aspek kejelasan pada kalimat. Kata yang dipilih *TEMPO* adalah “seolah-olah” yang membuat pembacanya berpikir, apa makna dibalik kata “seolah-olah” tersebut. Dengan kata lain, *TEMPO* memilih menggunakan kata kiasan dalam menampilkan faktanya.

Dari gambaran di atas, dapat dilihat bahwa *TEMPO* dalam menyikapi isu ini cenderung mengkritik Prabowo dan pendukungnya, serta mendukung pihak Jokowi dengan menampilkan sosok Jokowi dan para pendukungnya dengan model *good news* menggunakan teori *framing* yang dijelaskan oleh Entman.

Di sisi lain, *GATRA* dalam menyusun artikelnya lebih bersifat deskriptif dalam menuliskan fakta-fakta yang ada. Hal ini tampak pada kehati-hatian *GATRA* dalam menyusun naskah, yaitu dengan menulis isu dan sanggahan secara berdampingan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. *GATRA*, dalam hal ini, menjalankan apa yang disebut dengan konsep realisme. Kovach dan Rosenstiel, dalam bukunya *The Elements of Journalism* (2004), menjelaskan bahwa wartawan pada abad 19, tidak mengenal objektivitas, mereka lebih mengenal realisme. Mereka percaya bila seorang reporter menggali fakta-fakta dan menyajikannya begitu saja maka kebenaran bakal muncul dengan sendirinya.

Penyajian fakta apa adanya yang dilakukan *GATRA* ini telah dikonfirmasi oleh Rohmat Haryadi, seorang redaktur *GATRA* yang mengatakan bahwa:

“Tidak boleh kita menulis dari satu pihak atau menjadi corong dari satu pihak, supaya itu tidak terjadi, kita harus mengkritisi bahwa belum tentu apa yang disampaikan oleh pihak A itu benar, kita harus coba kritisi. Belum juga dari penyanggahnya juga benar. Maka kita tampilkan semuanya, biarkan pembaca yang menilai.”

GATRA lebih memilih untuk berdiri di garis tengah atau tidak berpihak ke pihak mana pun

dalam konteks politik, terutama pilpres. *GATRA* menyebutkan jika media berpihak, otomatis media itu menjadi partisan. Di lain pihak, *TEMPO* memiliki pandangan lain soal keberpihakan. *TEMPO* menilai pers, atau media, harus berpihak, berpihak pada kebenaran dan kepada orang yang lemah. Namun keberpihakan itu harus diikuti oleh independensi medianya.

TEMPO, melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu redaktornya, mengatakan bahwa *TEMPO* berpihak pada Jokowi, namun tetap menjaga independensinya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, alasan *TEMPO* berpihak pada Jokowi karena pesaing Jokowi, Prabowo, memiliki *trackrecord* yang membuat *TEMPO* menilai Prabowo tidak cocok untuk memimpin Indonesia. Maka dari itu *TEMPO* memilih berpihak dan mendukung pencalonan Jokowi. Namun bukan berarti *TEMPO* tidak *fair* dan *balance* dalam memberitakan Prabowo. Untuk menjaga keberimbangan tulisan dan pemberitaan tersebut, *TEMPO* menggunakan teori Entman yang juga sudah dijelaskan sebelumnya.

Pilihan-pilihan ini merupakan hasil dari ideologi masing-masing media dalam melihat isu. Ideologi di sini diartikan sebagai suatu cara pandang sebuah media terhadap sebuah isu. *TEMPO* dan *GATRA* memiliki ideologi yang sama terkait pemberitaan yang berhubungan dengan dasar-dasar kehidupan masyarakat. Contoh tentang memperjuangkan kebenaran dalam kasus kriminalitas, terorisme, kemiskinan, korupsi, dan lain sebagainya. Namun, ideologi atau cara pandang kedua media ini, berbeda dalam bidang politik, khususnya terkait persaingan politik. Salah satu contohnya adalah pilpres. Ideologi ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *framing* pemberitaan berita dan bagaimana kedua media ini mengkonstruksi realitas.

Berdasarkan teori *Mediating the Message*, faktor-faktor yang dapat memengaruhi konten pemberitaan media, selain faktor ideologi, adalah faktor rutinitas media dan organisasi media. Dalam dua faktor ini, *TEMPO* dan *GATRA* tidak memiliki banyak perbedaan.

Dilihat dari faktor rutinitas medianya, *TEMPO* dan *GATRA* mempertimbangkan audiens dalam pemilihan berita dan *angle* dari berita. Bagi *TEMPO*, pemilihan *angle* adalah suatu hal yang penting, yang harus selalu menyediakan temuan baru dan mendatangkan kemajuan bagi masyarakat. Redaktur *TEMPO*, Jobpie Sugiharto menjelaskan bahwa:

“TEMPO itu yang utama pemilihan angle, karena itu penting. Itu untuk bagaimana memunculkan sesuatu yang penting bagi masyarakat dan menarik. Kebaruan ada di situ, pentingnya ada di situ, investigasinya ada di situ. Di TEMPO itu kan mengharuskan ada temuan dalam sebuah berita. Apa temuan kita? Yang membuat ada kemajuan dan penting buat masyarakat, dan tentu beda dengan media lain.”

GATRA, dalam memilih *angle* dan menulis, mempertimbangkan kebaruan, kemasan yang berbeda dibanding media lain, dan yang paling penting memenuhi fungsi jurnalistik yaitu memberikan informasi, edukasi, kontrol sosial, dan hiburan. Seperti yang dijelaskan oleh redaktur *GATRA*, Asrori S. Karni, sebagai berikut.

“...prinsip-prinsip dasar jurnalistik bahwa media itu melakukan fungsi informasi, fungsi edukasi, kontrol sosial. Itu sudah melekat ya. jadi bagaimana, apa yang kita sajikan itu mesti informatif, punya nilai lebih secara informatif, mesti edukatif.”

Kemudian dilihat dari level organisasi medianya. Kebijakan terbesar dipegang oleh pemilik media melalui editor pada sebuah media. Shoemaker dan Reese mengatakan bahwa ketika tekanan datang untuk mendorong, pekerja secara individu dan rutinitas media harus tunduk pada organisasi yang lebih besar tujuannya. *TEMPO* dan *GATRA* tidak mengatakan demikian.

TEMPO mengaku, bagian dalam organisasi lain, selain bagian redaksi, tidak memiliki pengaruh terhadap penyusunan konten artikel. Terdapat sebuah garis pembatas di antara bagian redaksi dan bagian bisnis, yang memisahkan

keduanya dan yang membuat keduanya tidak dapat memengaruhi satu sama lain.

“Di TEMPO itu ada firewall atau garis api, antarbagian bisnis dan bagian redaksi. Masing-masing nggak bisa mempengaruhi. Kamu orang iklan nggak bisa ngomong sama aku, “Mas, tolong dibaik-baikin si Bakrie. Siapa lagi? Bumi Resources. Dia mau pasang iklan dua tahun, sebanyak 1T,” terus gue baik-baikin. Nggak bisa. Atau sebaliknya,” jelas Jobpie Sugiharto selaku redaktur majalah TEMPO.

GATRA, di sisi lain, mengatakan memang ada pengaruh bagian luar redaksi, seperti contohnya kebijakan manajemen media, dalam memilih isu atau menyaring informasi yang didapat, namun masih dalam batas yang masuk akan dan dapat dinegosiasi. Bagian *marketing* dapat memberikan masukan-masukan kepada bagian redaksi untuk hal-hal yang terkait penjualan, misalnya ketika ingin mengangkat sebuah isu dan diletakkan di halaman depan, *marketing* melihat masyarakat mungkin akan jenuh jika mengangkat isu tersebut, kemudian *marketing* pun memberi saran untuk mencari isu lain atau *angle* lain yang lebih menarik bagi masyarakat. Meskipun begitu, keputusan terakhir tetap dipegang oleh redaksi. Hal ini ditegaskan oleh redaktur *GATRA*, Asrori S. Karni yang mengatakan bahwa:

“Saya bisa sebut ada, tapi masih dalam batas yang negotiable. Karena pertimbangan-pertimbangan yang secara jurnalistik masuk akal. Misalnya, biasanya diskusinya itu... ada satu isu nih, ini masuk laporan utama, atau masuk bagian lain. Ah, cukup masuk nasional 4 halaman 5 halaman aja lah. Itu, misalnya pertimbangan marketing, ada masukan dari marketing: wah ini kalau kita front-up ini, kayaknya pasar udah jenuh nih. Karena sudah banyak di mana-mana informasinya. Ya kita pertimbangkan. Itu yang saya maksud, ini dalam batas-batas negosiasi yang masuk akal.”

Konstruksi Realitas *TEMPO* vs *GATRA*

Teori konstruksi realitas sosial oleh Berger dan Luckmann mengatakan bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh media melalui produk medianya dibangun dan dibentuk untuk suatu tujuan tertentu. Terdapat sebuah motif dalam tiap pesan dalam produk sebuah media. Motif ini berupa nilai-nilai yang ingin ditanamkan media dalam benak pembacanya. Seperti yang dikatakan Malcolm X (Rahmad Ibrahim, 2014: hukumonline.com) bahwa media memiliki kekuatan untuk mengontrol benak massa.

“The media’s the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that’s power. Because they control the minds of the masses.” –Malcolm X–

Dalam kaitannya dengan pemberitaan pelantikan Jokowi dalam *TEMPO* dan *GATRA*, terdapat perbedaan yang jelas terkait tujuan dibalik artikelnya. *TEMPO* membangun artikelnya dengan konstruksi yang negatif yang ditujukan kepada Prabowo dan pendukungnya dengan mengatakan bahwa usaha penjegalan yang dilakukan KMP di parlemen kekanak-kanakan dan bukanlah sebuah tindakan atau perilaku yang pantas bagi seorang anggota parlemen. *TEMPO* juga lebih menonjolkan usaha Jokowi dan para pendukungnya dalam membela diri. Fakta ini menunjukkan bahwa tujuan *TEMPO* dalam memilih *angle* tersebut adalah untuk membangun citra positif kepada Jokowi agar masyarakat, ataupun pembacanya, lebih memilih Jokowi sebagai presiden dalam pilpres 2014. Hal ini selaras dengan pernyataan redaktur *TEMPO* yang diwawancarai penulis, mengatakan bahwa mereka memilih mendukung Jokowi sebagai presiden dibandingkan dengan Prabowo. *TEMPO* memiliki sebuah motif dan nilai-nilai yang ingin *TEMPO* tanamkan dalam benak pembacanya, yaitu bahwa Jokowi adalah sosok yang baik dan pantas menjadi presiden Republik Indonesia, dibandingkan dengan pesaingnya.

Di sisi lain, karena *GATRA* memilih untuk tidak berpihak, maka penulis melihat *GATRA* hanya melakukan pelaporan yang bersifat deskriptif dan informatif. Hal ini terlihat dari kedua artikel, sebelum dan sesudah pelantikan.

GATRA tidak berusaha membangun citra positif bagi Jokowi dan Prabowo, namun juga tidak berusaha membangun citra negatif, *GATRA* hanya menjabarkan fakta yang mereka temukan. Dalam artikel pertama, *GATRA* mengatakan bahwa isu penjegalan tersebut hanyalah sebuah kekhawatiran dari KIH, bahwa penjegalan tidak mungkin terjadi. Namun bukan berarti kekhawatiran itu tidak berdasar. *GATRA* juga menjelaskan dari mana asal kekhawatiran itu, yaitu dari kemenangan KMP atas petinggi parlemen, dan UU pasal 74 MD3 ayat (1), (2), dan (6) yang memberi kekuatan lebih pada DPR atas pemerintahan. Lagi-lagi, *GATRA* memasangkan setiap pernyataan pro-kontra beriringan.

Penulis menilai bahwa *GATRA* lebih kepada menjabarkan fakta-fakta yang ada, tidak membangun konstruksi yang positif kepada salah satu pihak seperti yang dilakukan *TEMPO*. Hal ini sejalan dengan ideologi *GATRA* dalam hal kompetisi politik. *GATRA* mengaku tidak pernah berpihak kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kompetisi politik, mereka berdiri di garis tengah, tidak mendukung ataupun memihak pihak manapun.

Dua artikel *GATRA*, satu sebelum pelantikan dan satu lagi sesudah pelantikan, memaparkan fakta-fakta yang mereka dapatkan dari hasil liputannya. *GATRA* juga tidak menonjolkan fakta tertentu agar mendapatkan perhatian lebih, *GATRA* memaparkan semuanya. Pernyataan dan fakta terkait KMP selalu diikuti oleh fakta atau pernyataan dari KIH, begitu juga sebaliknya.

Dapat dikatakan bahwa apa yang dijelaskan Berger dan Luckmann melalui teori konstruksi realitas sosial, bahwa media memiliki peran membentuk realitas masyarakat memang benar, tapi tidak selamanya media mempraktikkannya. Dalam kasus pemberitaan pelantikan Jokowi, *TEMPO* menerapkan apa yang Berger dan Luckmann jelaskan dalam teori ini, sedangkan teori ini tidak ditemukan dalam artikel *GATRA*.

Tempo: Galau Media atau Kontrol Sosial

Jika dibandingkan artikel *TEMPO* sebelum dan sesudah pelantikan, terdapat perbedaan fokus konten artikelnya. Dalam artikel sebelum

pelantikan, *TEMPO* terlihat berpihak pada Jokowi dan membela Jokowi dengan membangun sebuah artikel dengan *tone* negatif yang ditujukan pada Prabowo dan pendukungnya. Sedangkan, dalam artikel sesudah pelantikan, *TEMPO* lebih mengkritik kemunduran pengumuman kabinet, tarik menarik yang terjadi dalam penyusunan tersebut antara Jokowi, JK, dan Megawati. Terlihat adanya ketidakkonsistenan dalam *angle* yang diangkat *TEMPO*, kadang memuji, kadang mengkritik. Hal ini dapat dilihat sebagai kegalauan media dalam memandang isu. Di sisi lain, penulis melihat ketidakkonsistenan ini sebagai sesuatu yang wajar. Hal ini berkaitan dengan fungsi kontrol sosial media. Memang *TEMPO* mengatakan bahwa mereka berpihak kepada Jokowi dan ingin Jokowi menjadi presiden, namun bukan berarti *TEMPO* tidak bisa mengkritik Jokowi dan pemerintahannya. *TEMPO* sebagai media yang independen tetap memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberikan kritik dan menginformasikannya kepada masyarakat. Dalam hal ini, *TEMPO* juga membuktikan independensi medianya, meskipun berpihak pada salah satu sisi yang berkompetisi.

Keberpihakan vs Tidak Berpihak : *TEMPO* vs *GATRA*

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan sebelumnya, penulis melihat bahwa *TEMPO* berpihak kepada salah satu pihak yang berkompetisi, yaitu pihak Jokowi, mereka memilih untuk mendukung Jokowi untuk menjadi presiden. Di sisi lain, *GATRA* mengatakan bahwa mereka tidak berpihak kepada sisi mana pun. Namun, penulis melihat bahwa *GATRA* tidak sepenuhnya tidak berpihak.

GATRA memang tidak memilih untuk berpihak kepada salah satu sisi yang berkompetisi, namun *GATRA* memilih untuk berpihak kepada kebenaran. Maka, hasil artikelnya pun hanya menuturkan fakta, kebenaran. Pihak satu mengatakan demikian, kemudian ada bantahan atau konfirmasi dari pihak satunya, dan keduanya disusun berdampingan. Untuk itu juga *GATRA* membiarkan pembacanya yang menilai, *GATRA* tidak menggiring pembacanya atau pun

masyarakat kepada sebuah nilai atau *mindset* tertentu.

Kemudian, penulis juga menilai bahwa sebenarnya *TEMPO* bukannya hanya berpihak kepada Jokowi saja, melainkan juga berpihak kepada kebenaran dan fakta seperti *GATRA*. *TEMPO*, melalui artikelnya ingin menggiring pemikiran pembaca bahwa Jokowi adalah calon presiden yang lebih pantas dibandingkan dengan pesaingnya. Ini adalah hasil dari keputusannya untuk mendukung Jokowi menjadi presiden. Namun, dalam artikel setelah pelantikan, *TEMPO* lebih terlihat memihak kepada kebenaran dan mengkritik Jokowi yang kurang tegas dan kompromi dalam menyusun kabinetnya. Hal ini memperlihatkan bahwa *TEMPO* lebih berpihak kepada kebenaran dibandingkan dengan berpihak kepada Jokowi. Keputusan *TEMPO* memilih untuk berpihak kepada Jokowi pun didasari dari fakta *trackrecord* Prabowo terkait kasus pelanggaran HAM yang dilakukannya pada awal masa reformasi.

Di sini berarti, *TEMPO* dan *GATRA*, keduanya sama-sama mengekspresikan kebenaran dan fakta. Namun, terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu terletak kepada keputusan mereka untuk berpihak kepada salah satu kubu yang berkompetisi atau tidak dalam kasus pilpres 2014.

Simpulan

Setelah melakukan proses analisis *framing* terhadap empat artikel laporan utama dalam majalah *TEMPO* dan *GATRA*, diskusi dengan narasumber, dan studi kepustakaan terkait pemberitaan presiden Jokowi, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan.

Pertama, penulis menyimpulkan bahwa, konstruksi yang dibangun oleh *TEMPO* terkait pemberitaan presiden Jokowi adalah Jokowi calon presiden yang pas untuk memimpin Indonesia dibandingkan dengan calon pesaingnya dalam pilpres 2014. Hal ini dapat dilihat dari *framing* yang dilakukan oleh *TEMPO* yang terkesan menyudutkan pesaing Jokowi dan menonjolkan aspek positif terhadap Jokowi dan para pendukungnya. Model artikel yang digunakan *TEMPO* dalam menulis artikel pun menggunakan model *bad news* yang

menampilkan objek dengan citra negatif, di mana objeknya adalah para pendukung pesaing Jokowi.

Sedangkan penulis tidak melihat konstruksi yang ingin dibangun oleh *GATRA*. Penulis menilai, *GATRA* hanya mengemukakan fakta-fakta yang ada, dari kedua sisi yang bersaing, dan membiarkan masyarakat dan pembacanya yang menilai sendiri terkait isu.

Kesimpulan kedua terkait faktor-faktor yang memengaruhi pembingkai dan penyusunan artikel pada *TEMPO* dan *GATRA*. Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa faktor yang memengaruhi ada tiga, yaitu level rutinitas media, organisasi media, dan level ideologi media. Dalam rutinitas media, keduanya sama-sama mempertimbangkan aspek audiens dalam memilih *angle* dan menulis artikel. Sedangkan dalam level organisasi media, *GATRA* dan *TEMPO* memiliki sedikit perbedaan. *TEMPO* memiliki pembatasan rigid yang memisahkan redaksinya dengan bagian lain, sedangkan *GATRA* lebih terbuka menerima saran dari bagian lain tetapi tetap memiliki kuasa penuh dalam penentuan akhir redaksinya.

Perbedaan terlihat jelas pada level ideologi khususnya terkait politik dan perselisihan politik. *TEMPO* memiliki pandangan yang mengatakan bahwa pers dan media harus berpihak namun tetap menjaga independensi medianya. Di sisi lain, *GATRA* memiliki ideologi yang tidak berpihak dalam politik dan persaingan politik. *GATRA* menilai, media tidak bisa berpihak, walaupun independen, karena ketika sudah berpihak, maka media itu akan menjadi partisan dan akan memengaruhi konten medianya. Jadi *GATRA* lebih memilih berada di antara yang berselisih, menuliskan fakta-fakta yang ada, dan membiarkan masyarakat dan pembaca yang menilai.

Daftar Pustaka

Bungin, Burhan (2011). *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa,*

Iklan Televisi, dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Eriyanto (2012). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media.* Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang.

Ibrahim, Rahmad (2014). *Netralitas Media di Indonesia Terkait Pilpres 2014 dan Tanggung Jawab Hukumnya,* <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53b1a2c5be4a0/netralitas-media-di-indonesia-terkait-pilpres-2014-dan-tanggung-jawab-hukumnya-broleh-rahmad-ibrahim-sh-ilm->. Diakses pada 10 Maret 2015.

Kovach, Bill, dan Tom Rosentiel (2004). *Elemen-Elemen Jurnalisme.* Diterjemahkan oleh Yusi A. Pareanom. Jakarta: Kerjasama Institut Studi Arus Informasi dan Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Kriyantono, Rachmat (2012). *Teknik Praktis Riset Komunikasi.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

McQuail, Denis (2011). *Teori Komunikasi Massa McQuail.* Jakarta: Salemba Humanika.

Shoemaker, P.J., and S.D. Reese. 1996. *Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content, Second Edition.* New York: Longman Publishers.

Susetyo, Nuriy Azizah (2014). *Kebijakan Media Darling dalam Pemberitaan Pemimpin Publik (Analisis Framing Pemberitaan Joko Widodo pada mTag #Fenomena Jokowi di Media Online Merdeka.com).* Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie.

Tamburaka, Apriadi (2013). *Agenda Setting Media Massa.* Depok: PT Rajagrafindo Persada.